

**ANALISIS PRESPEKTIF *ETHICS OF CARE* DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM *THREE END'S* DI PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

WAHYU SETIABUDI

NPM 1616021014



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

**ANALISIS PRESPEKTIF *ETHICS OF CARE* DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM *THREE END'S* DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh:

Wahyu Setiabudi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

ANALISIS PRESPEKTIF *ETHICS OF CARE* DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM *THREE END'S* DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh :

WAHYU SETIABUDI

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang masih mengalami persoalan tentang perempuan dan anak, hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih terjadinya perdagangan manusia, terjadinya disparitas ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) berupaya menjalankan fungsinya sebagai Lembaga pemerintah dalam tata kelola pemerintahan dengan mengimplementasikan program unggulan dari Kementerian Pemberdayaan perempuan dan anak Republik Indonesia yaitu program *three end's*. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan implementasi prinsip etika kepedulian dalam implementasi program *Three End's* di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh DPPPA.

Implementasi program *three end's* yang dilakukan DPPPA memiliki sasaran perempuan dan anak perlu dicermati dengan teori kritis yang berprespektif *feminist*, karena itu penelitian ini menggunakan teori *ethic of care*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

Dinas PPPA Provinsi Lampung telah menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, serta pembangunan melalui implementasi program *three end's*. kualitas moral dalam setiap fase *ethic of care* dapat dikatakan kompatibel dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta *human trafficking*, akan tetapi dalam upaya meningkatkan ekonomi perempuan dalam rangka mengurangi disparitas ekonomi antara perempuan dan laki-laki belum dapat dikatakan kompatibel dengan seluruh kualitas moral dalam setiap fase *ethic of care* karena anggaran yang kurang memadai menyebabkan hasil dari upaya yang dilakukan tidak maksimal, sehingga kualitas moral *competence* dalam fase *care giving* dan *responsiveness* dalam fase *care receiving* belum dapat dikatakan kompatibel

Kata Kunci : Etika Kepedulian, Implementasi *Three End's*, Provinsi Lampung

ABSTRACT

ETHIC OF CARE PRESPECTIVE ANALYSIS IN THE IMPLEMENTATION OF THE THREE END'S PROGRAM IN LAMPUNG PROVINCE

By :

WAHYU SETIABUDI

Lampung Province is one of the provinces that is still experiencing problems regarding women and children, this can be seen from the increase in violence against women and children, the occurrence of human trafficking, the occurrence of economic disparities between women and men. The Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) seeks to carry out its function as a government institution in governance by implementing the flagship program of the Ministry of Women's and Children's Empowerment of the Republic of Indonesia, namely the three end's program. The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of the ethical principle of caring in the implementation of the Three End's program in Lampung Province which was carried out by the DPPPA.

The implementation of the three end's program by DPPPA which targets women and children needs to be examined with a critical theory with a feminist perspective, therefore this research uses the ethical theory of care. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. The results of this study indicate that:

The PPPA Office of Lampung Province has carried out the functions of service, empowerment, and development through the implementation of the three end's program. Moral quality in every phase of ethics of care can be said to be compatible in efforts to prevent and handle violence against women and children and human trafficking, but in an effort to improve the economy of women in order to reduce economic disparities between women and men, it cannot be said to be compatible with all quality. moral in every phase of ethics of care because of inadequate budget causes the results of the efforts made are not optimal, so that the quality of moral competence in the phase of care giving and responsiveness in the phase of care receiving cannot be said to be compatible.

Keywords : Ethic of Care, Three End's Implementation, Lampung Province

Judul Skripsi : **ANALISIS PRESPEKTIF *ETHIC OF CARE* DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM *THREE END'S* DI
PROVINSI LAMPUNG**

Nama : *Wahyu Setiabudi*

NPM : 1616021014

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



[Signature]
Dr. Ari Darmastuti, M.A.

NIP:19600416 198603 2 002

[Signature]
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP: 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

[Signature]
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ari Darmastuti, M.A.



Sekretaris : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP



Penguji : Dr. Feni Rosalia, M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP.1961108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Agustus 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAL TEMPEL', and the serial number '5083AJX435624248'.

Wahyu Setiabudi

NPM. 1616021014

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Grobogan Jawa Tengah, pada tanggal 12 Oktober 1998, Nama lengkap penulis Wahyu Setiabudi, merupakan Putra Tunggal dari pasangan Bapak Darwin dan Ibu Sulika SAG. Penulis memulai jenjang pendidikannya di TK Kuntum Melati pada tahun 2003, lalu dilanjutkan SDN Bojong Rawalumbu VI Kota Bekasi pada Tahun 2010, setelah itu melanjutkan di SMPN 33 Kota Bekasi diselesaikan pada Tahun 2013 dan melanjutkan pada SMAS Widya Nusantara selesai pada Tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tahun 2016. penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan.

MOTTO

Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu

(Al-Ankabut : 43)

Katak di dasar sumur tidak mengetahui luasnya lautan, namun dia sangat memahami birunya langit

(Akane Aoi)

Selagi masih ada konsep pemenang, maka akan ada yang dikalahkan, tetapi tak apa untuk merasakan kekalahan berkali-kali karena kita hanya butuh satu kali kemenangan di akhir

(Wahyu Setiabudi)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan akal dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

“Ayah dan Ibu”

Terima kasih kepada kedua orang tua ku dan nenek tersayang yang telah mendidik, membesarkan, merawatku, mendoakan disetiap sujud, memberikan kasih dan sayang yang tiada henti-hentinya, dukungan dan selalu setia berada disisiku disaat sulit maupun senang, yang selalu menjadi semangat disetiap langkah.

Terimakasih karena telah menjadi orang tua yang hebat dan luar biasa, yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti untuk terus berjuang sehingga karya ini dapat kupersembahkan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRESPEKTIF *ETHIC OF CARE* DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM *THREE END'S* DI PROVINSI LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada penulis dan faktor-faktor lainnya.

Didalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT. Atas segala kebesaran, kuasa, serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW. atas risalah dan cahaya kebenaran yang disampaikan kepada kami.
2. Kedua orang tuaku Terima kasih atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do'a yang tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga Bapak dan Ibuku selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Wahyu Handayani SIP, M,Si selaku Dosen Pembimbing II, serta bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Dosen Pembimbing II pengganti , yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, pengarahan, motivasi dan sumbangan pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Feni Rosalia, M,Si. selaku Dosen Pembahas yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, motivasi dan sumbangan pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Seluruh pihak Dinas PPPA Provinsi Lampung dan UPTD PPPA yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman dekat, Lisya Fardiyanti Sari, Dina Maulida Putri, Syifa Aura, Tiara Febriana Roshary, Melika Susanti, Lanina Aprilia Kamil, Tri Ayu Sartika Zanti, Selvi Sancia, Ara Arilia, Ria Putri Wahyuni, Mia Nopita, Restita, Deavita, Regita Meirendra Putri, Shela, Anggi Yustika yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah penulis, mengisi hari-

hari penulis selama melakukan studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan dan semua bantuan yang tidak akan pernah terlupakan, semoga Allah selalu mempertemukan kita dengan orang-orang baik.

10. Untuk sahabat SMA Vera Itabiliana, Firman Adit Fidianto, Avandy Nugraha, Ghufron Ari, Rexky Mburak Ginting, Vikry Nur Fazrian, Marsel As Siddiq, Olga Oktaviani, Sri Lestari, Panggih dan Fauzan Ari. terimakasih telah memberikan canda dan tawa serta pengalam berharga, terimakasih, semoga persahabatan kita terjalin hingga akhir hayat dan semoga kita dapat mencapai kesuksesan kendati kita harus menatap hari esok masing-masing.
11. Untuk Sahabat senasib Perantauan. Moammar Avivan Haryomi, Akhmad Kurniawan, Desiawan, Yogi Dwika Satra, Reyza Sukma Fahri, Achmad Fajri, Hadi Darmawan, Vega Laila, Simamartin, Naura, Puput, kita bukan hanya sekedar sahabat, kita saudara, tetapi bertemu dengan seseorang lalu berpisah itu merupakan hal yang wajar bagi manusia, tidak ada orang yang bisa mempertahankan janji selamanya. Menderita, kesakitan, dan sengsara itu bagian dari hidup, kalau lebih dicermati hidup itu berat ya, pokoknya bertahanlah hari ini sampai nanti kita bisa bercengkrama kembali.
12. Untuk sahabat komplek Agung Nurmansyah, Rizky Panji Utomo, Dimas Prayogo, Ario Setiawan, Firman Adit, Tirto Unarto, Ramdan Saleh, Irvandy Fauzy, Novrizal Abdul Rasyid dan Muhammad Iqbal Insani terimakasih sahabatku atas segala motivasi, nasehat dan semangatmu untuk menjalani kehidupan ini, semoga Allah selalu melindungi kita semua.

13. Untuk seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2016, kita bukan hanya sekedar teman, kita saudara, terimakasih atas segala dukungan kalian, kelas yang gaduh dan kenangan indah yang telah diciptakan, semoga kita semua dipermudah untuk mencapai kesuksesan.

14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis, maka saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis harapkan dan akhir kata penulis ucapkan terima kasih, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022



Wahyu Setiabudi

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Keadilan, dan Kesetaraan Gender	11
2.2 Implementasi Program Pro Gender.....	13
2.3 <i>Fungsi dan Tata Kelola Pemerintahan</i>	14
2.4 <i>Ethic of Care</i> (Etika Kepedulian).....	15
2.5 Program Three Ends	19
2.6 Kerangka Pemikiran.....	20
III. METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Tipe Penelitian	23
3.2 Fokus Penelitian.....	23
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.4 Teknik Pengolahan Data.....	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
3.6 Teknik Validasi/ Keabsahan Data.....	31
IV. GAMBARAN UMUM.....	33
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
5.1 Prespektif Ethics of Care dalam Program <i>End Violence Againsts Woman and Children's</i> dan <i>End Human Trafficking</i>	42
5.2 Prespektif <i>Ethic of Care</i> dalam program <i>End Barrier to Economic Justice</i>	72
5.4 Analisis Prespektif <i>Ethic's of Care</i> dalam Program <i>End Violence Against's Woman and Children's</i> dan <i>End Human Trafficking</i>	91
5.5 Analisis Prespektif <i>Ethic's of Care</i> dalam Program <i>End Barrier to Economic Justice</i> 102	

5.6	Perbandingan Impelementasi <i>End Violence Againts Woman and Children</i> dan <i>End Human Trafficking</i> dengan <i>End Barrier to Economic Justice</i>	107
VI.	PENUTUP	109
6.1	Simpulan	109
6.2	Saran	111
	DAFTAR PUSTAKA	113
	TEKS WAWANCARA	116

DAFTAR TABEL

Table 1.Laporan data kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan SIMFONI-PPA tahun 2017-2019	1
Table 2.Data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kekerasan tahun 2017 – 2019	1
Table 3.Data Jumlah Korban Human Trafficking 2017-2019	2
Table 4.Data Kasus TPPO di Provinsi Lampung	2
Table 5.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, periode Agustus 2018-2019	3
Table 6.Indek Pembangunan Gender Provinsi Lampung Tahun 2018-2020	3
Table 7.Matrik Pengumpulan Data	28
Table 8. Program Kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan Kekerasan dan TPPO 2020	48
Table 9. Program Kegiatan Seksi Perlindungan Anak Tahun 2021	50
Table 10. Program dan Kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan TPPO	51
Table 11. Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dalam KDRT dan Situasi Khusus dan Darurat	53
Table 12. Daftar Tim Profesi UPTD PPPA	59
Table 13. Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	61
Table 14. Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak Tahun 2019-2021	64
Table 15. Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kekerasan	64
Table 16. Jumlah Korban dan Pelayanan yang diberikan	66
Table 17. Jumlah Kasus dan Korban yang telah tertangani UPTD PPPA Provinsi Lampung	67
Table 18. Program dan Kegiatan Bidang KHP dan KK Tahun 2020	77
Table 19. Program dan Kegiatan Bidang KHP dan KK Tahun 2021	78
Table 20. Jadwal Tentative dan Lokasi Bimtek Ekonomi Kreatif Tahun 2021	82
Table 21.Tabel Trianggulasi	88

Table 22.Wawancara dengan Ibu Renny Kepala Bidang KHP dan KK Dinas PPPA Provinsi Lampung.....	116
Table 23.Wawancara dengan Ibu Hanita Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.....	120
Table 24.Wawancara dengan Ibu Rini Pendamping UPTD PPPA Provinsi Lampung	124
Table 25.Wawancara dengan Bapak Yahya Bidang Perencanaan Dinas PPPA Provinsi Lampung.....	126
Table 26.Wawancara dengan Ibu Anis Bidang PHPA Dinas PPPA Provinsi Lampung.....	129

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang masih mengalami persoalan tentang perempuan dan anak, fakta ini dapat dilihat dari adanya data mengenai persoalan tersebut. Pertama, terkait dengan tujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak (*End Violence Against Women and Children*), data dari Dinas PPPA Provinsi Lampung menunjukkan jumlah korban kekerasan perempuan dan anak berdasarkan SIMFONI-PPA dan berdasarkan jenis kekerasan yang di alami dari tahun 2016 – 2019 di Provinsi Lampung mengalami peningkatan.

Table 1.Laporan data kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan SIMFONI-PPA tahun 2017-2019

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN	KORBAN		KORBAN BERDASARKAN UMUR	
				L	P	Anak	Dewasa
1	2017	225	246	35	201	160	86
2	2018	225	271	64	207	213	58
3	2019	376	417	92	325	320	97

Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung

Table 2.Data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kekerasan tahun 2017 – 2019

NO	JENIS KEKERASAN	2017	2018	2019
1	Seksual	148	154	251
2	Fisik	56	75	107
3	Psikis	41	75	62
4	Penelantaran	20	16	13
5	Trafficking	1	3	6
6	Eksplorasi	5	1	3
7	Lainnya	13	11	33
JUMLAH		284	335	475

Dapat dilihat bahwa data jumlah korban pada table 3 dan jumlah korban berdasarkan jenis kekerasan pada table 4 terdapat perbedaan, hal ini menunjukkan bahwa sebagian korban mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.

Kedua, terkait dengan *Human Trafficking*, Dinas PPPA Provinsi Lampung mencatat bahwa jumlah korban yang mengalami jenis kekerasan *Trafficking* mengalami peningkatan dari 2017 sampai dengan 2019 dan Polda Lampung mencatat masih terdapat kasus TPPO di Provinsi Lampung

Table 3.Data Jumlah Korban *Human Trafficking* 2017-2019

Jenis Kekerasan	Tahun	Jumlah Korban
<i>Human Trafficking</i>	2017	1
	2018	3
	2019	6

Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung

Data kasus TPPO yang tercatat di Polda Lampung menunjukkan penurunan kasus di tahun 2019, tetapi jumlah kasus ini tidak memastikan jumlah korban

Table 4.Data Kasus TPPO di Provinsi Lampung

Tahun	Polda	Polresta Bandar Lampung	Polres Lampung Selatan	Polres Tanggamus	Polres Metro	Polres Lampung Timur	Polres Way Kanan
2017	2			2			
2018	6				1		1
2019		1		1	1	1	

Suber data : Polda Lampung 2019

Ketiga, mengenai kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan peran, status tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sering menciptakan ketidakadilan. Misalnya rata-rata upah sebulan bagi pekerja perempuan yang berstatus buruh/karyawan/pegawai hanya 1,92 juta rupiah, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang sebesar 2,48 juta rupiah (Badan Pusat

Statistik Provinsi Lampung, 2018). Hal ini dapat mengindikasikan terdapat ketidakadilan gender.

Data di Provinsi Lampung tahun 2017 sampai 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) Provinsi Lampung, perempuan lebih rendah bila dibandingkan TPAK laki-laki. Fenomena ini terjadi karena pada umumnya perempuan menyanggah peran ganda, yaitu selain aktif dalam kegiatan perekonomian mereka juga dituntut untuk berperan dalam mengasuh anak-anak mereka ataupun mengerjakan pekerjaan rumah tangga (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2018).

Table 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, periode Agustus 2018-2019

Keterangan Waktu	Perempuan	Laki-laki
Agustus 2017	48,43	86,28
Agustus 2018	51,49	86,96
Agustus 2019	51,20	86,13

Sumber: Bps.co.id (TPAK), 2017-2019

Selain TPAK, salah satu indikator penting dalam pasar kerja adalah IPG (Indeks Pembangunan Gender). Pada tahun 2018 IPG Provinsi Lampung mengalami penurunan hingga tahun 2020, hal tersebut berpengaruh kesenjangan ekonomi yang terjadi antara perempuan dan laki-laki.

Table 6. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung Tahun 2018-2020

No	Tahun	Indek Pembangunan Gender
1	2018	90,570
2	2019	90,390
3	2020	90,330

Sumber : Bps.co.id, 2018-2020

Data di atas merupakan persoalan-persoalan ketidakadilan yang menyangkut perempuan dan anak, hal ini diperkuat oleh Iris Marion Young yang berpendapat bahwa ada lima kriteria penindasan (*Five Face Oppression*) yaitu, *exploitation, marginalization, powerlessness, culture imperialisme, dan violence*, (Young, 1949), data di atas menunjukkan

bahwa kriteria penindasan yang di sebut Iris Marion Young masih kerap terjadi seperti, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, sampai dengan kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki pun masih terjadi di Provinsi Lampung dan bahkan kasus yang terjadi terus mengalami peningkatan.

Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dalam menangani persoalan tersebut yang tertera dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permenpppa) Nomor 6 Tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan anak, yaitu : “bahwa Negara memiliki kewajiban memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak”.

Selain itu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender Pemerintah merumuskan 3 (tiga) arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana mandat dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- b. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (PTPPO)
- c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. (Simanjuntak, 2017)

Sebagai upaya untuk merealisasikan misi dari kabinet kerja yaitu mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendasarkan misi ini dalam tiga pilar yakni pertama, pemberdayaan perempuan. Kedua, perlindungan perempuan dan anak,

serta ketiga, pemenuhan hak anak. Selaras dengan misi kabinet kerja yang didasari oleh tiga pilar tersebut, KPPPA sendiri memiliki strategi untuk mewujudkan isu gender dan isu hak anak sebagai isu yang harus menjadi perhatian seluruh warga Indonesia, dan pada tahun 2016, misi KPPPA tersebut diimplementasikan dalam program *Three Ends* yang merupakan program unggulan KPPPA tahun 2016 (Simanjuntak, 2017). Strategi *Three Ends* sendiri memiliki tiga tujuan akhir, pertama, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, mengakhiri perdagangan manusia. Ketiga, mengakhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan (Kemenpppa, 2018).

Pemerintah pada dasarnya memiliki empat fungsi, yaitu fungsi pelayanan (*service*), fungsi pengaturan (*regulating*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi pemberdayaan (*empowerment*), selain itu Pemerintah Provinsi Lampung sendiri memiliki kewajiban untuk menghasilkan keadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah :

- a. Mewujudkan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang.
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui partisipasi masyarakat.
- c. Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui upaya-upaya untuk meminimalkan segala bentuk tindak kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun bentuk kekerasan lainnya
- d. Mendorong keberhasilan penyelenggaraan program keluarga berencana dan memfasilitasi terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ketahanan keluarga.
- e. Mewujudkan tata kelola organisasi yakni akuntabel dan terintegrasi

Selain itu adanya Dinas PPPA Provinsi Lampung adalah sebagai bentuk dari adanya otonomi daerah sehingga Dinas PPPA Provinsi Lampung memiliki kewajiban untuk menjalankan program *three end's*. Mewujudkan tujuan dari program *Three Ends* tentu diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Maka dari itu Dinas PPPA Provinsi Lampung yang adalah organisasi perangkat daerah ikut serta menjalankan program *Three Ends* tersebut. Dinas PPPA Provinsi Lampung membangun sinergi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dalam mengimplementasikan program *Three Ends* di Provinsi Lampung (Lampung News, 2019).

Dinas PPPA Provinsi Lampung mengimplementasikan program/kegiatan untuk mewujudkan *three end's* akan tetapi masih terdapat kesenjangan antara tujuan dari program *Three Ends* dan data yang ada di provinsi lampung, hal ini dapat terjadi akibat proses implementasi, karena implementasi merupakan tahap paling penting dalam keseluruhan struktur kebijakan atau program, pentingnya implementasi ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam (Agustino, 2006) bahwa: "*The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints jackets unless they are implemented*". Maka dari itu tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan.

Dalam proses implementasi, sumber daya manusia (*Human Resouces*) berperan sangat penting, tugas atau fungsi implementor (baik individu maupun organisasi) ditentukan oleh tingkat profesionalisme dan kualifikasi manusia pendukungnya. Namun, kemampuan teknis (*skill*) dan keluasan wawasan (*knowledge*) saja belum cukup memadai untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa kepuasan dihati masyarakat. Maka dari itu moral, etika maupun sikap dan perilaku menjadi penting. (Putra, 2011). Dalam implementasi program/kebijakan, etika bagi sumber daya

manusia sebagai implementor menjadi penting untuk di perhatikan karena kebijakan/program hendaknya juga harus dilakukan sebaik mungkin, sebab suatu kebijakan pemerintah tidak hanya mengandung konsekuensi yuridis semata, tetapi juga konsekuensi etis atau moral.

Program unggulan *three end's*. merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menghasilkan keadilan bagi perempuan dan anak, *Ethic of care* sebagai salah satu aliran dalam filsafat moral, menawarkan pendekatan tindakan moral yang pertama-tama sebagai komitmen moral untuk merawat, melindungi, menyembuhkan, memberi dukungan, tetapi sekaligus juga memperjuangkan tata sosial yang adil, yang memungkinkan terwujudnya karakter moral kepedulian semacam itu (Held, 2006). *Ethic of Care* sangat relevan untuk dijadikan prespektif teori dalam menganalisis program yang berorientasi pada perempuan dan anak, dengan menggunakan prespektif etis ini kita dapat mengetahui apakah sumber daya manusia dalam implementasi program *Three Ends* di Provinsi Lampung mencerminkan *value* dari etika kepedulian untuk memberi kegiatan memperdulikan yang berkualitas demi mencapai tujuan dari program tersebut

Peneliti telah melakukan beberapa penelusuran tema-tema dari penelitian terdahulu dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini sebagai upaya dalam *litelatur review*, beberapa diantaranya, yaitu :

1. Rikha Anggraini (2018) Analisis kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi lampung dalam mengentaskan kasus kekerasan anak dibawah umur. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengentasan kasus kekerasan anak yang dilihat dilihat dari empat faktor yaitu Pencapaian prestasi kerja, kuantitas dan kualitas pekerjaan, tanggung jawab, Sistem kerja (Digilib.unila.ac.id).

2. Andi Kasmawati , Lu'mu Taris (2019) Implementasi Program *Three End's* sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga di Kota Makassar. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program *Three End's* sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga dilihat dari pelaksanaan programnya, faktor penghambat, serta strategi implemetasinya (Kasmawati & Taris, 2019)
3. Yeremias Jena (2016) Watak Kepedulian dalam Kepemimpinan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Penelitian ini melihat etika kepedulian dalam kepemimpinan individu seseorang melalui sikap dan kebijakan yang dilakukan atau di ambil oleh individu tersebut sedangkan dalam penelitian ini prespektif etika kepedulian digunakan untuk melihat etika normative sumber daya manusia dalam implemetasi suatu program yang responsif terhadap perempuan dan anak sehingga terdapat perbedaan yang mendasar. (Jena, 2016)
4. Dalam jurnal *Teaching and Higher Education Critical Prespektive* dengan judul *Analysing the professional development of teaching and learning from a political ethics of care perspective* yang ditulis oleh Vivienne Grace Bozalek (Vol.19, 2014). Disini ia menggunakan etika politik joan tronto sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi implementasi model pengembangan profesional pengajaran dan pembelajaran di lembaga pendidikan tinggi Afrika Selatan. Etika politik kepedulian ditemukan menjadi kerangka kerja normatif yang berguna bagi sekelompok pendidik tinggi untuk merefleksikan proses keterlibat dalam pengajaran dan pembelajaran pengembangan profesional karena mengungkapkan pentingnya hubungan kekuasaan yang berbeda (Bozalek, 2014)

5. Daniel Engster (2020) *American Journal and Political Science* dengan Judul *A Public Ethics of Care for Policy Implementation*. Engster menganjurkan etika kepedulian yang berbeda untuk menggantikan etika hak konvensional. Ia membahas cara-cara di mana etika kepedulian dapat dimanfaatkan dan diterapkan pada konteks hak anak. etika kepedulian feminis dapat menjadi pendekatan konstruktif terhadap konteks hak anak karena menekankan tanggung jawab dan hubungan, konteks konkret dari saling ketergantungan, dan memungkinkan anak menjadi pemain sosial yang aktif dengan suara daripada penerima pasif dari kepedulian dan hak. (Engster, 2020). Relevansi mengenai etika kepedulian dengan persoalan hak anak dalam Jurnal yang dikemukakan oleh Daniel Engster ini menjadi pendukung penelitian ini

Penelitian serta jurnal terdahulu di atas dapat menjadi *input* pendukung dan pembeda yang memperlihatkan nilai kebaruan dalam penelitian ini yang berjudul prespektif *ethic of care* dalam implementasi program *Three Ends* di Provinsi Lampung. Nilai kebaruan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa etika sumber daya manusia sebagai implementor dalam implementasi program *three ends*. Peneliti menggunakan prespektif etika kepedulian dalam penelitian ini karena etika sumber daya manusia menjadi hal yang sangat potensial mempengaruhi keberhasilan suatu program, terlebih lagi program *three ends* merupakan program yang mencakup persoalan kekerasan, perdagangan manusia, serta disparitas ekonomi yang berorientasi pada perempuan dan anak, dalam program ini sangat diperlukan hubungan relasi yang intens dan itu merupakan nilai dari etika kepedulian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi prinsip etika kepedulian oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam program *Three End's* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis implementasi prinsip etika kepedulian oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam program *Three End's*

1.4 Manfaat Penelitian

2. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah dan berguna bagi pengembangan kajian gender karna *ethic of care* dapat menjadi alternatif baru sebuah perspektif etika normatif.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi bagi Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam implementasi program *Three Ends* di Provinsi Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab sebelumnya peneliti telah membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait tinjauan pustaka dengan tujuan agar pembaca mengetahui mengenai konsep teori dari para ahli yang menjadi dasar dan dukungan pemikiran dari penelitian ini. Kosep teori yang dijabarkan dalam bab ini disusun secara terstruktur dengan argumentasi yang berkaitan.

2.1 Keadilan, dan Kesetaraan Gender

2.1.1 Keadilan Gender

Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result.* (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi *fair* baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya *fair*, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan (Najih, 2017)

Menurut teori *nature* adanya perbedaan laki – laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa, karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Menurut teori *nature* tentu kita dapat melihat bahwa ada perbedaan yang tidak mungkin bisa di setarakan antara laki-laki dan perempuan sehingga bagi kaum feminis keadilan yang dimaksud bukan hanya sekedar kesetaraan, keadilan mesti melihat apa yang disebut *Different* bukan hanya sekedar *Equal Opportunity*.

2.1.2 Kesetaraan Gender

Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results.* (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan). (Najih, 2017)

Injustice (ketidakadilan) bagi perempuan bukan hanya sekedar kekurangan hak tetapi kulminasi dari segala jenis penderitaan termasuk penderitaan terhadap harapan akan masa depan, hal ini merupakan suatu konsep yang tidak mungkin dipahami oleh laki-laki karena *injustice* pada laki-laki sengkali hanya penderitaan akibat kekurangan hak

Konsep kesetaraan dan keadilan gender atau yang biasa kita sebut dengan *Gender Equality* perlu dijelaskan untuk dapat membedakan antara konsep keadilan *Gender Equality* dan konsep keadilan bagi Feminisme, seringkali dua konsep ini di satukan sehingga dianggap sama. Pada dasarnya *Gender Equality* dan Feminisme seringkali tidak kompatibel karna tujuan daripada *Gender Equality* menghendaki adanya kesetaraan dalam segala bidang antara laki-laki dan perempuan, sedangkan feminisme ingin agar supaya ada perubahan logika dalam kebijakan untuk memastikan segala jenis dari budaya atau praktek patriarkhi berhenti. Maka dari itu dalil filosofis feminisme lebih radikal daripada *Gender equality* karna setara tidak selalu berarti adil dan feminisme ingin menghasilkan lebih dari sekedar kesetaraan yaitu keadilan yang absolut (*Absolute Justice*).

2.2 Implementasi Program Pro Gender

Menurut Horn dalam (Tahir, 2014) “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan (Riggs, 2005).

Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan

dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Soejipto, 2010)

Program *Three Ends* dapat dikategorikan sebagai program yang responsive gender dikarenakan program *Three Ends* sendiri merupakan program unggulan yang didasari oleh strategi dari pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak, maka dari itu program *Three Ends* mesti diselenggarakan dengan posisi etika yang kritis dan sesuai untuk dapat mencapai tujuan program tersebut dalam implementasinya.

2.3 Fungsi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah pada dasarnya memiliki setidaknya dua fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer tersebut adalah fungsi pelayanan, fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor, selain itu pemerintah juga mempunyai fungsi *regulating* dalam fungsi primer, yaitu untuk mengatur seluruh sektor dalam kehidupan masyarakat dengan kebijakan dalam bentuk perundang-undangan (Dwiyanto, 2015).

Pemerintah tidak hanya memiliki fungsi primer, tetapi pemerintah juga memiliki fungsi sekunder, fungsi sekunder pemerintah yaitu, fungsi Pembangunan (*Development*), fungsi pembangunan ini perlu dilakukan pada saat kondisi masyarakat dirasa melemah dan pembangunan akan di kontrol ketika kondisi masyarakat membaik dalam arti menuju taraf sejahtera. Fungsi sekunder tidak hanya fungsi pembangunan, tetapi juga terdapat fungsi pemberdayaan (*Empowerment*), Fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai *skill* maupun kemampuan untuk bisa keluar zona aman (Dinashti, 2017).

Fungsi pemerintah tersebut, baik fungsi primer maupun sekunder merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam hal ini Dinas PPPA Provinsi Lampung telah melaksanakan fungsi tersebut melalui implementasi program *three end's*, karena program *three end's* dengan tiga tujuannya yaitu, *end violence againts woman and*

children, end human trafficking, dan end barrier to economic justice telah melingkupi seluruh fungsi primer maupun sekunder karena terdapat unsur pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan.

2.4 *Ethic of Care* (Etika Kepedulian)

Etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau suatu organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan (Fernanda, 2003), Etika dapat diartikan juga sebagai moral (Bartens, 2001). Merujuk pada pengertian ini maka etika sangat berkaitan dan penting bagi para pelaksana program yang merupakan individu-individu yang menjalankan program tersebut.

Etika kepedulian adalah model perkembangan moral di mana imperatif moral tertinggi membutuhkan penjagaan kebutuhan dan mempertahankan hubungan (Day, 2000), karena itu kepedulian pada dasarnya merupakan tantangan terhadap gagasan bahwa individu adalah sepenuhnya otonom dan mandiri. (Maeckelberghe, 2005). Gilligan menegaskan bahwa “*care perspective*” adalah sebuah alternatif bagi penalaran moral tradisional, yang telah disamakan oleh tradisi keadilan liberal yang bersifat maskulin serta terfokus pada bentuk otonom dan merdeka. Bagi Gilligan, perbedaan kedua penalaran moral ini adalah perbedaan tema, bukan perbedaan bias gender. (Cypher, 2020)

Menurut Sevenhuijsen, etika kepedulian menambahkan dimensi pada analisis kebijakan. ia bertindak sebagai sebuah lensa yang melaluinya kerangka kerja normatif dapat dilihat, memberikan analisis ‘seperangkat pertanyaan dan konsep kepekaan yang harus membantu menggali elemen-elemen yang relevan dalam dokumen kebijakan’. Dokumen kebijakan bertindak sebagai ‘kendaraan paradigma normatif’ (Sevenhuijsen, 2004).

Konsep teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu etika kepedulian, sebagaimana dikandung oleh Fisher dan Tronto, mereka mengidentifikasi empat langkah dalam proses kepedulian (Tronto J. C., 2013), yaitu :

1. *Caring about*, pada fase kepedulian pertama ini, seseorang atau beberapa kelompok memperhatikan kebutuhan yang tidak terpenuhi.
2. *Caring for*, setelah kebutuhan diidentifikasi, seseorang atau beberapa kelompok harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan ini terpenuhi.
3. *Care giving*, fase ketiga kepedulian membutuhkan pekerjaan pemberi kepedulian yang sebenarnya dilakukan.
4. *Care Receiving* Setelah pekerjaan kepedulian selesai, akan ada tanggapan dari orang, benda, kelompok, hewan, tumbuhan, atau lingkungan yang telah dipedulikan.
5. *Caring with*, fase kepedulian akhir ini mensyaratkan bahwa kebutuhan perhatian dan cara-cara mereka dipenuhi harus konsisten dengan komitmen demokratis terhadap keadilan, kesetaraan, dan kebebasan untuk semua. Untuk berpikir tentang kepedulian yang demokratis, yang tidak berada pada tingkat generalisasi tetapi jenis kepedulian yang lebih khusus, bagi Tronto tampaknya ada fase kepedulian kelima

Etika kepedulian feminis yang demokratis dimulai dari kepekaan terhadap batas tradisional yang ditarik antara politik dan etika. Dalam masyarakat yang secara sistematis mendevaluasi kepedulian, jenis kualitas dan kapasitas moral yang terkait dengan kepedulian sering tidak terlihat di antara nilai-nilai etika yang paling penting. Dengan demikian, pemikir yang peduli dengan etika kepedulian feminis mulai memberikan penjelasan tentang nilai-nilai lain yang harus dilihat sebagai kualitas moral yang penting. Nilai-nilai ini tumbuh dari proses kepedulian yang kompleks itu sendiri, serta dari kebutuhan warga negara dalam masyarakat demokratis untuk dapat mengekspresikan kebutuhan mereka. Terdapat

empat fase kepedulian yang telah diidentifikasi oleh Berenice Fisher dan Tronto (Tronto J. C., 2013), yaitu :

1. *Attentiveness – caring about*

Pada fase kepedulian pertama ini, seseorang atau beberapa kelompok memperhatikan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini membutuhkan kualitas moral perhatian, penangguhan kepentingan diri sendiri, dan kapasitas untuk benar-benar melihat dari perspektif orang yang membutuhkan. (Bahkan, kita mungkin juga memperhatikan atau tidak memperhatikan kebutuhan kita sendiri.)

2. *Responsibility – caring for*

Setelah kebutuhan diidentifikasi, seseorang atau beberapa kelompok harus mengambil beban memenuhi kebutuhan tersebut. Ini adalah tanggung jawab, dan itulah kualitas moral utama dari fase kedua ini.

3. *Competence – care giving*

Dengan asumsi tanggung jawab belum sama dengan melakukan pekerjaan memperdulikan yang sebenarnya, melakukan pekerjaan seperti itu adalah tahap ketiga dari kepedulian dan membutuhkan kualitas moral kompetensi. Agar kompeten untuk peduli, mengingat tanggung jawab kepedulian seseorang, bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah moral. (Tronto J. C., 2013) Menurut Joan C. Tronto, tindakan nyata dalam menciptakan kehidupan yang lebih manusia pada level *taking care of* harus didukung oleh kompetensi (Gastmans, 2006:183). Karakter *care giving* dalam pemahaman Tronto sebenarnya adalah bagaimana memastikan bahwa tindakan etis *caring* dapat terlaksana dengan baik sebagaimana diharapkan, dan ini sangat tergantung pada kompetensi, baik menyangkut kemampuan para *care giver* maupun berbagai sarana yang digunakan dalam tindakan etis.

4. *Responsiveness – care receiving*

Setelah pekerjaan kepedulian selesai, akan ada tanggapan dari orang, kelompok, hewan, tumbuhan, lingkungan, atau hal yang telah dipedulikan. Mengamati respons itu, dan membuat penilaian tentang hal itu (misalnya, apakah kepedulian yang diberikan sudah memadai, berhasil, atau lengkap?) Memerlukan kualitas moral responsif. Orang yang dipedulikan tidak perlu menjadi orang yang menyelesaikan proses merespons, tetapi beberapa tanggapan diperlukan, dan tanggapan akan sering melibatkan catatan bahwa kebutuhan baru muncul ketika yang lama terpenuhi, sehingga proses berlanjut.

5. *Plurality, communication, trust and respect; solidarity-caring with*

Selma Sevenhuijsen (1998) mengidentifikasi serangkaian kualitas tambahan yang diperlukan untuk memperdulikan masyarakat yang demokratis. Mereka termasuk, pertama, menjadikan kepedulian sebagai prioritas, sehingga seseorang memiliki komitmen untuk menangani kompleksitas moral "ketergantungan, kerentanan dan keberbedaan" untuk membuat hidup layak untuk dihuni dan layak dijalani. Lebih lanjut, Sevenhuijsen berpendapat, kepedulian juga membutuhkan komitmen "pluralitas, komunikasi, kepercayaan dan rasa hormat." kualitas-kualitas ini yang diidentifikasi oleh Sevenhuijsen untuk membantu menjelaskan apa kualitas moral kritis yang akan memungkinkan orang untuk mengambil tanggung jawab bersama, untuk memikirkan warga sebagai penerima dan pemberi kepedulian, dan untuk berpikir serius tentang sifat kebutuhan kepedulian di masyarakat. Dengan demikian, paralel dengan fase kepedulian kelima.

Joan C. Tronto berpendapat bahwa etika kepedulian dapat menjadi nilai moral dan dasar bagi pengaturan sosial karena jenis etika ini mengusahakan pendekatan “keterlibat” (*engaged approach*) sebagai pengganti terhadap pendekatan “ketakterlibatan” (*disengaged approach*) sebagaimana sangat ditekankan dalam etika tradisional. Bagi Tronto dan para pendukung etika kepedulian, tujuan tertinggi yang dikejar dalam sebuah kehidupan bersama adalah harmoni dan bukan sekadar tata masyarakat yang adil (French & Weis, 2000). Tujuan ini selaras dengan tujuan dari program *Three Ends* untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak, sehingga perspektif *Ethics of Care* ini menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini.

2.5 Program Three Ends

Harapan dan tujuan akhir dari program *Three Ends* pertama, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, mengakhiri perdagangan manusia. Ketiga, mengakhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan (Kemenpppa, 2018). Dalam pengertian yang paling umum, semua orang yang tertindas mengalami hambatan kemampuan mereka untuk mengembangkan dan melatih kapasitas mereka dan mengekspresikan kebutuhan, pikiran, dan perasaan mereka. Dalam pengertian abstrak itu semua orang yang tertindas menghadapi kondisi yang sama (Young, 1949).

Iris Marion young mengkategorikan penindasan menjadi lima kategori yaitu, eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme budaya, dan kekerasan (Young, 1949). Berdasarkan penjelasan sebelumnya program *Three Ends* dapat dianggap sebagai reaksi praktis untuk menyelesaikan beberapa persoalan penindasan ini berdasarkan strategi mengenai pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di Indonesia.

Figure 1. Program Unggulan *Three End's*

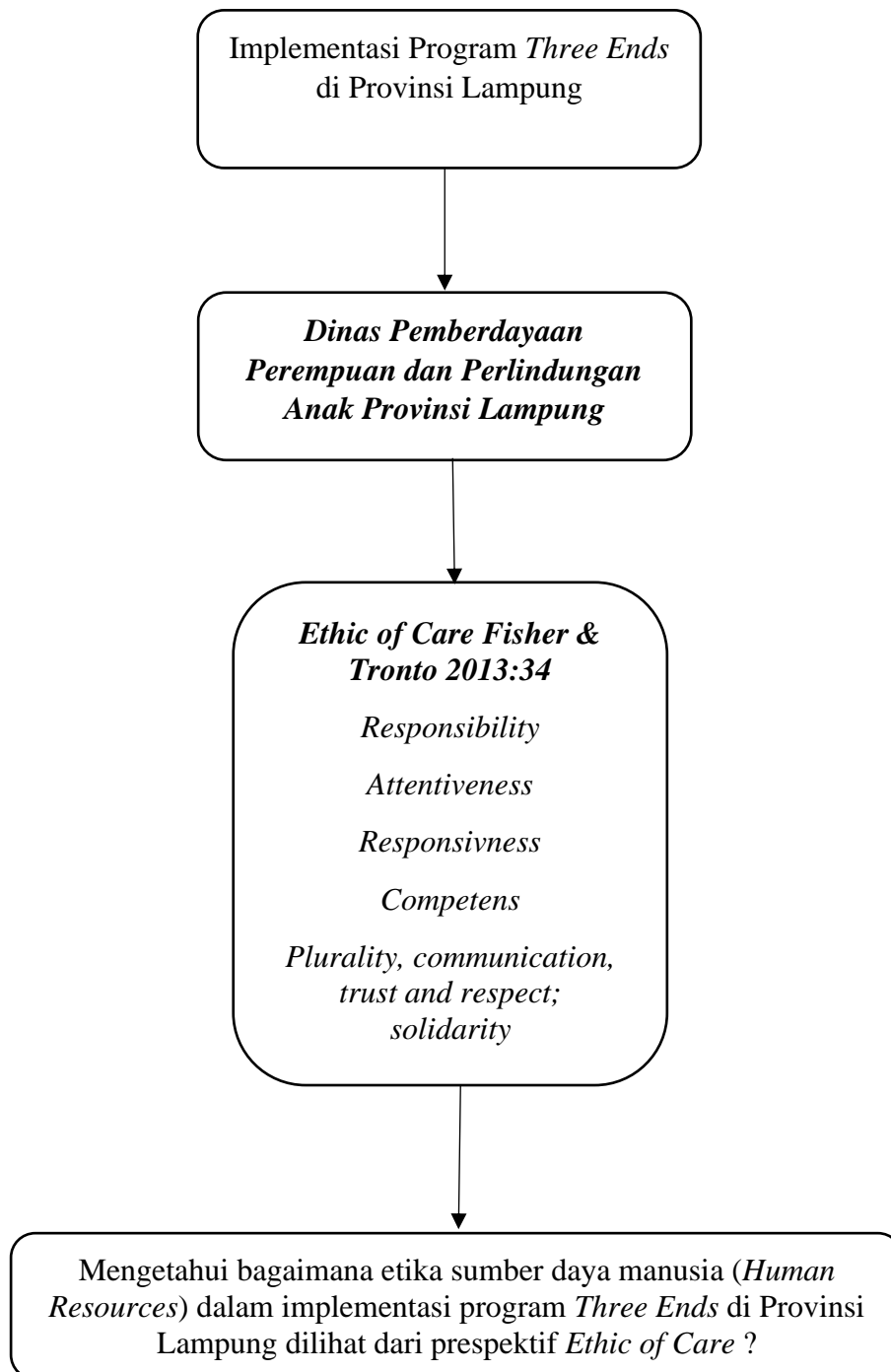


Provinsi Lampung juga telah menjalankan program-program untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terkait persoalan ketidakadilan gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Lampung kembali membangun sinergi dengan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) setelah berhasil mengimplementasi program unggulan *Three Ends* di masyarakat (Lampung News, 2019)

2.6 Kerangka Pemikiran

Konsep adalah alat intelektual. Mereka dirancang untuk dan melayani tujuan tertentu. Dengan demikian, untuk memiliki konsep kepedulian belum cukup untuk membahas ranah kepedulian di dunia. Untuk peduli, seperti konsep apa pun, dapat ditempatkan di sejumlah teori, dan tergantung pada teori di mana ia ditempatkan, itu akan memiliki makna yang berbeda. Kepedulian normatif tidak muncul dari kejelasan konseptualnya, tetapi dari teori politik dan sosial yang lebih besar di mana ia ditempatkan (Sevenhuijsen, 2004)

Sumber daya manusia (*Human Resouces*) menjadi faktor penting dan sangat berpengaruh dalam proses implementasi program. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk menganalisis etika sumber daya manusia dalam implementasi program *Three Ends* di Provinsi Lampung menggunakan prespektif teori *ethic of care* dengan memeriksa apakah sumber daya manusia sebagai *Care Giver* dalam implementasi program *Three Ends* di Provinsi Lampung menjadikan etika kepedulian sebagai acuan dan pedoman bertindak normatif yang membawa akibat dan pengaruh secara moral dengan nilai-nilai (*value*) dari teori *ethic of care* menurut Fisher & Tronto yaitu, *responsibility, attentiveness, responsivness, competens, Plurality, communication, trust and respect; solidarity*, analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana etika sumber daya manusia sebagai implementor dalam implementasi program *Three Ends* yang merupakan program responsive gender dilihat dalam prespektif teori *ethic of care*.

Figure 2. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian terhadap program *Three Ends* di provinsi Lampung dalam perspektif *ethic of care* ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan tehnik wawancara dan observasi. Setelah itu mengkaji, dan membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau diperhitungkan dalam sistem angka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai perspektif etika kepedulian dalam implementasi program *three ends* di Provinsi Lampung yang dijalankan Dinas PPPA Provinsi Lampung

3.2 Fokus Penelitian

Didalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan/atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin, 2012). Peneliti sosial diharapkan jeli dan peka menangkap fenomena-fenomena yang muncul dalam ranah kehidupan sosial. Suatu fenomena dan praktik-praktik sosial

yang layak diangkat sebagai fokus kajian penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis menggunakan perspektif *Ethic of Care* menurut J.C Tronto & Fisher dalam implementasi program *Three Ends* yang dilaksanakan Dinas PPPA Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program *Three Ends* di Dinas PPPA Provinsi Lampung dilihat dari perspektif teori *ethic of care*. Hal yang perlu diketahui dan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

a. *Caring about - Attentiveness*

Pada fase kepedulian pertama ini, seseorang atau beberapa kelompok memperhatikan kebutuhan yang tidak terpenuhi, ini membutuhkan kualitas moral perhatian, penanggungan kepentingan diri sendiri, dan kapasitas untuk benar-benar melihat dari perspektif orang yang membutuhkan, pada fase ini yang akan dilihat adalah bagaimana cara identifikasi kebutuhan sasaran program yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung, baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan terkait Program *Three End's*

b. *Caring for - Responsibility*

Setelah kebutuhan diidentifikasi, seseorang atau beberapa kelompok harus mengambil beban memenuhi kebutuhan tersebut, fase ini memberi perhatian tentang apa sebenarnya yang mendasari rasatanggungjawab, dan bagaimana bentuk tanggungjawab yang dilakukan Dinas PPPA Provinsi Lampung sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya

c. *Care giving - Competens*

Memastikan bahwa tindakan etis *caring* dapat terlaksana dengan baik sebagaimana diharapkan, dan ini sangat tergantung pada kompetensi, sehingga dalam fase ini perlu untuk diketahui bagaimana kompetensi baik menyangkut kemampuan para *care giver* di Dinas PPPA Provinsi Lampung dan berbagai sarana seperti memadai atau tidaknya anggaran yang digunakan dalam tindakan etis yang dilakukan

d. *Care receiving - Responsivness*

Tanggapan dari yang diperdulikan, tanggapan akan sering melibatkan catatan bahwa kebutuhan baru muncul ketika yang lama terpenuhi, sehingga proses berlanjut. Beberapa hal yang penting untuk diketahui dalam fase ini adalah tentang bagaimana hasil dari Tindakan yang telah dilakukan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan yang telah diidentifikasi di fase awal, dan bagaimana respon dari sasaran program yang diberi kepedulian

e. *Caring with - Plurality, communication, trust and respect; solidarity*

Memperdulikan masyarakat yang demokratis, selain menjadikan kepedulian sebagai prioritas, diperlukan juga beberapa kualitas tambahan untuk merawat kepedulian itu dengan pluralitas, dalam fase ini penting untuk mengetahui kuat atau tidaknya hierarki yang didalam internal Lembaga Dinas PPPA Provinsi Lampung maupun hierarki antar Lembaga Dinas PPPA Provinsi, kab/kota, bahkan sampai tingkat desa, hal tersebut penting diketahui untuk melihat apakah hierarki yang ada kuat atau tidak karena hierarki yang kuat potensial menghambat komunikasi, komunikasi yang terhambat akibat hierarki artinya terdapat problem kepercayaan baik antar *care giver* maupun Lembaga karena kepercayaan harus ditandai

dengan legalitas prosedur, dan hal tersebut akan sangat menghambat dalam proses Kerjasama (*Solidarity*) dalam melakukan semua fase dalam konsep *Ethic of Care*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain : mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain (Moelong & Lexy, 2017)

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara karena melalui wawancara peneliti dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Dengan teknik wawancara data yang dibutuhkan akan lebih akurat karena diperoleh dari sumbernya. Peneliti melakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara.

2. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik dalam memperoleh data melalui pengamatan terhadap suatu objek atau orang pada periode tertentu (Burhan, 2012:39). Jenis observasi yang akan diterapkan oleh peneliti yaitu jenis observasi non partisipan, Observasi dikatakan non partisipan apabila observer tidak ikut ambil bagian kehidupan observe

(Riyanto, 2010) dan jenis observasi sistematis. Peneliti menggunakan observasi non partisipan karena dalam penelitiannya tidak ikut andil dalam segala macam kegiatan yang dilakukan observe. Penggunaan observasi sistematis bertujuan supaya observasi yang dilakukan oleh peneliti terstruktur, tidak keluar dari alur penelitian

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017)

Table 7.Matrik Pengumpulan Data

Tujuan	Indepth Interview (Primer)	Observasi (Primer)	Dokumentasi (Sekunder)
<p>Untuk mencari data/informasi yang berkaitan dengan implementasi program <i>Three Ends</i> dan prespektif etika kepedulian secara lebih mendalam</p>	<p>Alat: Pedoman wawancara (Wawancara Terstruktur) Substansi: Seluruh informasi yang berkaitan dengan kajian etika kepedulian (<i>Ethic of Care</i>) dalam implementasi program <i>Three Ends</i> di provinsi Lampung Informan: Tokoh yang terlibat dan mengetahui tentang program <i>Three Ends</i> di provinsi Lampung dan kajian <i>etich of care</i>. Adapun informan dalam penelitian ini adalah, Sekertaris Dinas PPPA Provinsi Lampung Ibu Hanita, Ibu Anis Bidang PHPA, Bapak Yahya Bidang Perencanaan, Ibu Renny Bidang KHP dan KK, Ibu Rini Pendamping di UPTD PPPA, Pemilihan informan: <i>Purposive Sampling</i>, dan <i>Snowball Sampling</i></p>	<p>Teknik: <i>Non-Participant Observation</i>. Substansi: data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak</p>	<p>Substansi: Dokumentasi ini di gunakan untuk pengumpulan data sekunder yang terkait dengan implementasi Program <i>three ends</i> di provinsi lampung Sumber: Laporan Kinerja 2020, Laporan Kinerja 2021, Bahan ekspos bidang PHPA, Bahan Rakor bidang KHP, Bahan Rakor bidang Data, Bahan Rakor UPTD, P21 Trafficking 2017-2019, Sidik Trafficking 2020, Rekap SIMFONI-PPA 2016-2010, Laporan Data Kekerasan Provinsi Lampung 2021, Laporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan UPTD PPPA 2016-2021</p>

3.4 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yaitu setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Singarimbun, Masri, & Efendi, 2008) terdiri dari :

1. Editing

Editing kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data dari hasil dokumentasi, hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan, dan mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan dari kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan oleh sumber daya manusia (*Human Resources*) dalam program *Three Ends* sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi mengenai etika sumber daya manusia dalam implementasi program *three ends* yang telah dideskripsikan berdasarkan indikator teori *ethic of care* baik melalui narasi maupun tabel dari proses editing selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, display (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Miles, B. Mathew, & Huberman, 1992) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Peneliti dalam reduksi data ini melakukan pemilihan dan membuang data yang dianggap tidak perlu dari hasil editing yang telah di deskripsikan dalam proses interpretasi untuk memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

2. Display (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang sudah di pilih, disederhanakan, dan ditransformasikan untuk memusatkan perhatian disajikan dan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik

kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan dianalisis menggunakan prespektif teori *ethic of care* yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian ini. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

3.6 Teknik Validasi/ Keabsahan Data

menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan (Moelong & Lexy, 2017) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria :

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong, 2014:331)

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban.

3. Kebergantungan (*Dependity*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber berupa hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan dan data dokumentasi peneliti serta hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan cara ikut dalam kegiatan merupakan cara yang peneliti lakukan untuk menguji kebenaran data yang sebelumnya.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung

1. Sejarah singkat

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Dinas PP dan PA) Provinsi Lampung adalah Lembaga yang di bentuk oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui upaya-upaya pemberian perlindungan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini sebelumnya bernama Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak letaknya cukup strategis yang berada di jalan WR.Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung dan letaknya satu tempat dengan kantor Gubernur Provinsi Lampung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi Misi dan Fungsi

Berdasarkan tinjauan objek tentang kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menetapkan visi yaitu terwujudnya kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan kesejahteraan keluarga bagi aparat dan public. Penetapan visi ini telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hendak diperjuangkan untuk membantu pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh Provinsi Lampung. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang di emban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah :

- Mewujudkan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang.
- Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui partisipasi masyarakat.
- Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui upaya-upaya untuk meminimalkan segala bentuk tindak kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun bentuk kekerasan lainnya
- Mendorong keberhasilan penyelenggaraan program keluarga berencana dan memfasilitasi terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ketahanan keluarga.
- Mewujudkan tata kelola organisasi yakni akuntabel dan terintegrasi

Sementara itu dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat.
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat.
- Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan tugas di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat lingkup Provinsi dan kabupaten/kota.
- Pemantauan, evaluasi dan pelapororan dibidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat.
- Pelaksanaan kesekretariatan badan, sebagai pendukung tugas teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja aturan dan gambar nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur

merrupakan landasan atau dasar kerja agar mereka melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan menanamkan sifat tanggung jawab sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi masalah di pekerjaan. Tugas dan tanggung jawab seorang pekerja dapat dilihat dari struktur yang ada yang telah ditentukan oleh bandan organisasi tersebut. Susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiridari :

- a. Kepala Dinas : Dewi Budi Utami, S.E
- b. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Yanti Hakim S.H.,MM
 - Sub Bagian Keuangan; Oktiana S.E
 - Sub Bagian Perencanaan; Nurul Awali Fauziah SS.i., M.Si
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi;
 - Seksi Pengarustamaan Gender Bidang Ekonomi; N Ida Efrina, S.Pd.
 - Seksi Pengarustamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum; Sri Wulan, S.E
 - Seksi Kualitas Keluarga; Diana Rosalina, S.Sos
- d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, membawahi;
 - Seksi Data dan Informasi Gender; Dra. Fitri Dendhi
 - Seksi Data dan Informasi Anak;
 - Seksi Partisipasi Masyarakat; Drs. Imam Firdaus
- e. Bidang Perlindungan Perempuan, membawahi;
 - Seksi PP dan KDRT; Elya Hartati, S.Sos
 - Seksi PP dalam Ketenaga Kerjaan dan TPPO; Nyimas E.R. Intari, S.Sos
 - Seksi Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus darurat; Prima Astuti, S.H., MM

- f. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, membawahi;
- Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak; Arcun Joni, S.Sos., MM
 - Seksi Tumbuh Kembang Anak; Santiara, S.Sos., MM
 - Seksi Perlindungan Anak; Anna Susi Suhartini, S.Sos.,MM
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

4. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI
I	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
	Kegiatan : Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	450 Orang	15 Kab/Kota
	Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	377 Orang	13 Kabupaten
II	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak		

	Kewenangan Provinsi		
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	15 Kab/Kota

Bidang Tumbuh Kembang Anak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TERGET	LOKASI
I	PROGRAM PEENUHAN HAK ANAK (PHA)		
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksana Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	335 Orang	Bandar Lampung
	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	45 Orang	Bandar Lampung
	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah/Kabupaten	200 Orang	Bandar Lampung

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI
I	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	120 Orang	Bandar Lampung
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan		

	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	285 Orang	Bandar Lampung, Tulang Bawang
II	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	175 Orang	Pesawaran, Lamteng, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan

BIDANG DALDUK DAN KB

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI
I	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
	Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
	Sub Kegiatan : Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	125 Orang	Bandar Lampung
II	PROGRAM PRMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
	Kegiatan : Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal		
	Sub Kegiatan : Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	240 Orang	Pesawaran, Pringsewu, Metro

III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA		
	Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	300 Orang	10 Kab/Kota
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	40 Orang	Bandar Lampung

BIDANG DATA GENDER DAN ANAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI
-----------	-------------------------	---------------	---------------

I	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
	Kegiatan : Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	1 Dokumen	Bandar Lampung
	Sub Kegiatan : Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	4 Unit	Bandar Lampung, Lamsel, Pesisir Barat, Mesuji

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Dinas PPPA Provinsi Lampung sebagai Lembaga pemerintah atau organisasi perangkat daerah dalam melakukan tata kelola pemerihatatan sudah menjalankan fungsinya sebagai pemerintah, mulai dari fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan, fungsi tersebut dapat dilihat dari terlaksananya program *three end's*, fungsi pelayanan dan pengaturan dapat dilihat melalui upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO, fungsi pembangunan dan pemberdayaan dapat dilihat melalui upaya peningkatan ekonomi perempuan dengan adanya pelatihan ekonomi kreatif pengolahan sampai pemasaran.

Implementasikan program serta kegiatan yang berkaitan dengan *end violence against woman and children* dan *end human trafficking* memiliki pendekatan yang berbeda antara upaya pencegahan dan penanganan. Identifikasi kebutuhan sasaran program dalam upaya pencegahan kekerasan, *human trafficking* dan upaya untuk mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi yang berkenaan dengan program *three ends* yaitu *end barriers to economic justice* diidentifikasi berdasarkan data dan evaluasi program sebelumnya sehingga terdapat fakta yang dialami para *care giver* dalam mengidentifikasi sasaran program. Identifikasi dalam upaya penanganan dilakukan memberikan pelayanan yang terdapat adanya interaksi langsung dengan korban seperti konseling awal untuk mengidentifikasi kebutuhan korban kekerasan maupun *Human Trafficking*.

Responsibility dalam upaya pencegahan dapat dilihat dengan adanya program serta kegiatan khususnya melalui bidang PHPA, upaya dalam mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi terhadap perempuan dilakukan beberapa program dan kegiatan melalui bidang KHP dan KK untuk memenuhi kebutuhan sasaran program yang sebelumnya telah diidentifikasi. *Responsibility* dalam upaya penanganan terdapat layanan bantuan hukum yang termasuk dalam pendampingan, mediasi, atau pengelolaan korban, selain itu terdapat juga program inisiatif seperti program tali kasih, hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan korban.

Program maupun layanan baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan dan *human trafficking* telah ditunjang dengan anggaran yang memadai, tetapi dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi masih terdapat kendala anggaran yang kurang memadai dalam program bintek yang dilakukan bidang KHP dan KK. Sumber daya manusia dalam implementasi program dan kegiatan pencegahan kekerasan dan TPPO serta upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dapat dikatakan memiliki kompetensi, dalam hal ini sinergisitas *care giver* dengan orang atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, *human trafficking*, dan pengembangan usaha mikro, lalu dalam memberikan pelayanan penanganan dilakukan oleh *care giver* yang profesional karena memiliki status pendidikan atau bahkan profesi seperti psikolog anak dan lawyer atau disebut juga sebagai tenaga ahli

Upaya Pencegahan kekerasan dan TPPO yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat penurunan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 2019 dengan 407 kasus dan 461 korban menurun pada 2020 menjadi 360 kasus dan 433 korban, lalu menurun kembali pada tahun 2021 dengan 261 kasus dan 284 korban, akan tetapi dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dalam program bintek masih terdapat ketidakberlanjutan kelompok usaha perempuan kepala keluarga merupakan hasil yang bertentangan dengan apa yang diharapkan. Respon dari upaya penanganan kekerasan dan TPPO yang dilakukan melalui UPTD PPPA ditunjukkan oleh adanya komunikasi antara *care giver* dengan korban

sebelumnya mengenai persoalan yang berbeda dan data yang menunjukkan terdapat penurunan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pada tahun 2019 terdapat 151 korban, 2020 terdapat 146 korban dan 2021 menurun menjadi 134 korban.

Dinas PPPA Provinsi Lampung maupun UPTD PPPA merupakan lembaga yang memiliki otoritas hierarki yang tidak terlalu kuat sehingga komunikasi antar *care giver* tidak terhambat dan *care giver* dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO, serta upaya dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang dilihat berdasarkan perspektif *ethic of care*, sehingga dengan demikian implementasi upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO dapat dikatakan kompatibel dengan kualitas moral yang terdapat di semua fase *ethic of care*, akan tetapi dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi yang berkenaan dengan salah satu tujuan dari program *three ends* yaitu *ends barriers to economic justice* masih belum dapat dikatakan kompatibel dengan *ethic of care* karena masih terdapat kekurangan dalam fase *care giving* dengan kualitas moral *competence* dan *care receiving* dengan kualitas moral *responsiveness*.

6.2 Saran

Dinas PPPA Provinsi Lampung belum dapat memenuhi seluruh fase *ethic of care* dengan kualitas moral yang terdapat didalamnya pada upaya mengatasi kesenjangan ekonomi terhadap perempuan yang berkenaan dengan salah satu tujuan dari program *three ends* yaitu *ends barriers to economic justice*, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut.

Dinas PPPA Provinsi Lampung sebagai pemberi kepedulian harus sudah mempersiapkan semua termasuk sarana dan prasarana seperti anggaran dan kompetensi sumber daya manusia, apabila anggaran sebagai prasarana tidak memadai maka harus ada upaya secara teknis untuk menyesuaikan apa yang akan dilakukan dengan anggaran yang ada tanpa harus mengorbankan kualitas dari program dan kegiatan yang dilakukan karena akan berpengaruh

pada hasil, selain itu Dinas PPPA Provinsi Lampung juga harus melakukan peninjauan terhadap data mengenai sasaran program untuk meminimalisir data fiktif perempuan kepala rumah tangga dalam program kegiatan bintek

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bartens, K. (2001). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fernanda, D. (2003). *Etika Organisasi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Gilligan, C. (1982). *In A Different Voice*. London, Massachusetts, United States of America: Harvard University Press.
- Held, V. (2006). *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global*. New York: Oxford University Press.
- Marthis, R. L., & Jhon H. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salembat Empat.
- Miles, B. Mathew, & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIP.
- Moelong, & Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riggs, F. W. (2005). *Administrasi Negara-negara berkembang – Teori Masyarakat Prismatik*. Jakarta: PT Rajawali.
- Singarimbun, Masri, & Efendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Smart, C., & Neale, B. (1999). *Family Fragments*. Cambridge: Policy Press.
- Soejipto, W. B. (2010). *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara Books.
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tronto, J. C. (1993). *Moral Boundaries A Political Argument For an Ethic of Care*. London: Routledge.

- Tronto, J. C. (2013). *Caring Democracy Markets, Equality, and Justice*. New York: New York University Press.
- Tronto, J., & Sevenhuijsen. (2007). A feminist ethic of care. In S. Balloch, & M. Hill, *Care, Community and Citizenship: Research and Practice in a Changing Policy Context* (pp. 62-63). Great Britain: The Policy Press.
- Young, I. M. (1949). *Justice and Political Difference*. United Kingdom: Princeton University Press.

JURNAL

- Bozalek, V. G. (2014). Analysing the professional development of teaching and learning from a political ethics of care perspective. *Teaching in Higher Education Critical Prespective*, 19, 447-458
- Day, K. (2000). The Etich of Care and Women's Experiences of Public Space. *Journal of Environmetal Psychology*, 22(2), 103-124.
- Engster, D. (2020). A Public Ethics of Care for Policy Implementation. *American Journal and Political Science*, 64(3), 621-633.
- French, W., & Weis, A. (2000). An Ethics of Care or an Ethics of Justice. *Journal of Business Ethics*, 125-136.
- Gina, A. (2017, Maret 10). *Kebijakan Publik Berperspektif Perempuan Mengakui Keberbedaan Sekaligus Kesetaraan Perempuan*. (A. Sigirot, Performer) Perayaan Hari Perempuan Internasional, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Gerung, R. (2006). Feminisme dan Universitas. *Jurnal Perempuan*, 48, 71.
- Koggel, C., & Orme, J. (2010). Ethics and Social Welfare . *Care Ethics: New Theories and Applications*, 2.
- Maeckelberghe. (2005). Feminist Ethic of Care : A Third Alternative Approach. *ResearchGate*, 14, 321.
- Najih, M. A. (2017). Gender dan Kemanjuaan Teknologi Pemberdayaan Perempuan Pendidikan dan Keluarga. *Media Komunikasi Islam Tentang Gebder dan Anak*, II(12), 22-23.
- Sigiro, A. (2017). kebijakan publik berprespektif perempuan mengakui keberadaan sekaligus kesetaraan perempuan. *Jurnal Perempuan*, 1.

ARTIKEL

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2018). *Profil Perempuan Provinsi Lampung 2018*. Provinsi Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Cypher, A. (2020, februari 12). *Notes on In a Different Voice by Carol Gilligan*. Retrieved from acypher.com: <http://acypher.com/BookNotes/Gilligan.html>
- Dinashti. (2017, Agustus 22). Fungsi Pemerintah. Retrieved from Demokrasi Indonesia: <http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/10/fungsi-pemerintah.html>
- Kemenpppa. (2018, April 04). *KERJA BERSAMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PUG DI DAERAH*. Retrieved from Kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1747/3>
- Lampost.co. (2019, Agustus 22). *Lampost.co*. Retrieved from Lampost.co: <https://www.lampost.co/berita-lampung-masuk-fase-darurat-kekerasan-perempuan-dan-anak.html>
- Lampung News. (2019, Januari 17). *Kadis PPPA Bayana Terima Audiensi Forum Puspa, Jalin Sinergi untuk Implementasikan Program Unggulan Three Ends*. Retrieved from Medinaslampungnews.co.id: <https://www.medinaslampungnews.co.id/kadis-pppa-bayana-terima-audiensi-forum-puspa-jalin-sinergi-untuk-implementasikan-program-unggulan-three-ends/>
- Lampungpemprov.go.id. (2019, November 13). *Dinas PP Dan PA Bentuk Gugus Tugas TPPO Cegah Trafficking*. Retrieved from Lampungpemprov.go.id: <https://lampungprov.go.id/detail-post/dinas-pp-dan-pa-bentuk-gugus-tugas-tpo-cegah-trafficking>
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2019, November 13). *Dinas PP Dan PA Bentuk Gugus Tugas TPPO Cegah Trafficking*. Retrieved from Lampungprov.go.id: <https://lampungprov.go.id/detail-post/dinas-pp-dan-pa-bentuk-gugus-tugas-tpo-cegah-trafficking>
- Saleh, H. (2019, Agustus 22). *Dinas PPPA Lampung: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat*. Retrieved from kupastuntas.co: <https://www.kupastuntas.co/2019/08/22/dinas-pppa-lampung-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat/>
- Simanjuntak, T. (2017, Januari 6). *"Three Ends", Pelangi Bagi Perempuan dan Anak*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/thurneyesen/5869f933c322bd30076d4ad2/three-ends-pelangi-bagi-perempuan-dan-anak?page=all>